

## **BAB VI**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Pada bab ini memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, serta arah kebijakan setiap strategi yang dipilih sebagai rumusan perencanaan yang komprehensif untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan secara sistematis strategi dan arah kebijakan. Dengan adanya strategi yang kemudian diikuti dengan arah kebijakan yang tepat, maka pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dalam lima tahun ke depan diharapkan akan memiliki fokus yang jelas, terarah dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi merupakan satu kunci penting untuk pencapaian tujuan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memuat langkah-langkah yang berisikan Program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan merupakan pedoman yang mengarahkan Rumusan Strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun periode RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi yang akan menjadi fokus penanganan permasalahan yang hendak diselesaikan dalam setiap tahunnya setiap periode tahunan selama lima tahun sehingga memiliki kesinambungan untuk setiap periode dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.

Strategi dan Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

**Tabel 6.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2016-2021**

**Misi 1: Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlakul-karimah dan Berkualitas.**

| <b>No.</b> | <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>  | <b>Arah Kebijakan</b>   |
|------------|--|--|---|
| 1.         | Meningkatnya nilai-nilai empati dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sosial   | Peningkatan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menanamkan nilai empati dan kepedulian sosial             | Melakukan integrasi dalam pengembangan pendidikan agama dan keagamaan semua jenjang pendidikan formal, pengembangan kapasitas BAZDA dan lembaga ekonomi sosial keagamaan, meningkatkan kesadaran zakat profesi dan pemberdayaan fakir miskin, mualaf. |
| 2          | Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan  | Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pelayanan keagamaan  | Melakukan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji; bantuan pembangunan sarana dan prasarana keagamaan; bantuan kesejahteraan ajengan, guru diniyah, amil, serta membangun Islamic Center.  |
| 3          | Tuntasnya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan terlaksananya rintisan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun                            | Penyelenggaraan pendidikan dasar yang terjangkau dan bermutu dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menengah | Menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan merintis wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta kapasitas pendidikan dasar, menengah dan pesantren;   |
| 4          | Meningkatnya mutu manajemen tata kelola pendidikan   | Peningkatan jumlah sekolah terakreditasi dan nilai akreditasi sekolah  | Melakukan peningkatan pemenuhan SPM dan fasilitasi terhadap pelaksanaan akreditasi sekolah jenjang SD dan SMP   |
| 5          | Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan bagi anak usia dini dan pendidikan luar sekolah yang merata, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat | Penyelenggaraan PAUD dan PLS   | Membantu peningkatan ketersediaan PAUD dan lembaga penyelenggara PLS di setiap Desa   |
| 6          | Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan  | Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan  | Menyelenggarakan pengembangan kompetensi, fasilitasi penyelenggaraan UKG, fasilitasi pengelolaan sertifikasi guru   |

| <b>No.</b> | <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan</b>   |
|------------|--|---|---|
| 7          | Menurunnya angka putus sekolah terutama peserta didik kurang mampu           | Penyediaan bantuan anggaran untuk peserta didik kurang mampu dan berprestasi  | Melakukan pendataan peserta didik kurang mampu yang rawan drop out dan pemberian beasiswa bagi peserta didik miskin dan berprestasi                             |
| 8          | Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan inklusif                             | Peningterasian dan pengembangan pendidikan inklusif   | Meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, pemerataan dan peningkatan mutu PLB dan berkebutuhan khusus                    |
| 9          | Meningkatnya kreativitas siswa di semua jenjang pendidikan                   | Penyelenggaraan event dan pengeiriman delegasi siswa dalam setiap kompetisi   | Melakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi bantuan keikutsertaan serta pemberian penghargaan.   |
| 10         | Meningkatnya kemampuan dan budaya baca masyarakat                            | Penyediaan perpustakaan dan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis Teknologi Informasi                          | Menyediakan buku/bahan bacaan yang sesuai minat dan kebutuhan baca masyarakat; membangun perpustakaan yang terintegrasi dengan taman bermain di setiap wilayah. |
| 11         | Meningkatnya derajat kesehatan keluarga dan gizi masyarakat                  | Peningkatan pola hidup sehat dan kesadaran terhadap pemenuhan gizi  | Melakukan sosialisasi dan pendidikan gizi bagi masyarakat, pengembangan dokter keluarga.  |
| 12         | Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam penyehatan lingkungan             | Pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan  | Melakukan pelatihan, sosialisasi dan partisipasi masyarakat, dalam penyehatan lingkungan  |
| 13         | Meningkatnya akses dan pemerataan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana, tenaga medis dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular | Melakukan peningkatan status RSUD/Puskesmas, pemenuhan SPM; pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, gangguan mental serta gizi masyarakat  |
| 14         | Meningkatnya pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat miskin    | Peningkatan anggaran dan cakupan penerima jaminan kesehatan   | Meningkatkan peran dan fungsi UCPK, menyediakan bantuan pembiayaan, peningkatan cakupan jaminan kesehatan   |

| <b>No.</b> | <b>Sasaran</b>  | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan</b>  |
|------------|---|---|--|
| 15         | Meningkatnya pemenuhan ketersediaan dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan serta sistem informasi kesehatan | Peningkatan mutu manajemen pelayanan, regulasi dan Teknologi Informasi kesehatan  | Melakukan peningkatan kapasitas manajemen pelayanan, survey mutu layanan, dan pemanfaatan TI Kesehatan               |
| 16         | Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi        | Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, mendekatkan jarak layanan, peningkatan kesadaran ibu hamil, melahirkan dan masyarakat resiko tinggi.                  | Meningkatkan kapasitas tenaga medis, menambah sarana prasarana, melakukan sosialisasi dan pendampingan.              |
| 17         | Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk  | Peningkatan kepesertaan KB dan kualitas Peserta KB  | Menyediakan KB gratis bagi warga miskin, sosialisasi dan pendidikan KB bagi PUS                                      |
| 18         | Terkendalnya persebaran penduduk  | Pemerataan wilayah pertumbuhan pembangunan, pengendalian urbanisasi dan pendidikan transmigrasi.  | Mengembangkan wilayah pertumbuhan baru, peningkatan minat, kemampuan dan kemandirian calon transmigran               |
| 19         | Tertibnya pengelolaan administrasi kependudukan dan meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan (Akta, KK, KTP) | Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis Teknologi Informasi  | Meningkatkan pemanfaatan TI, sosialisasi kepemilikan dokumen kependudukan dan melakukan pelayanan prima              |
| 20         | Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan anak                                       | Peningkatan keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan lembaga publik, peningkatan kesadaran kesetaraan gender dalam pembangunan dan perlindungan terhadap anak | Meningkatkan pendidikan politik perempuan, partisipasi dan akses perempuan dalam pembangunan dan terlindunginya anak |

| <b>No.</b> | <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan</b>   |
|------------|--|---|---|
| 21         | Meningkatnya kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)        | Peningkatan pemberdayaan dan cakupan penanganan PMKS  | Melakukan pelatihan, pendampingan dan kemampuan penanganan PMKS   |
| 22         | Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan kesempatan kerja                      | Peningkatan kompetensi dan daya saing, informasi dan akses ketenagakerjaan, peningkatan pelayanan ketenagakerjaan dan perlindungan serta pengawasan ketenagakerjaan | Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperluas informasi dan akses ketenagakerjaan, pendampingan penempatan kerja, perlindungan hak-hak pekerja, pengawasan ketenagakerjaan |
| 23         | Meningkatnya daya saing dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah | Peningkatan keterlibatan pemuda, kompetensi pemuda dan pemberdayaan OKP   | Melakukan peningkatan kompetensi kewirausahaan, membuka akses keterlibatan, memfasilitasi kegiatan OKP  |
| 24         | Meningkatnya prestasi bidang olah raga   | Peningkatan sarana dan prasarana, pembiayaan dan pembinaan prestasi olah raga   | Menyelenggarakan event kompetisi, membangun SOR, memberikan penghargaan atlet dan pembina olah raga berprestasi.  |
| 25         | Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah                         | Pengembangan event kebudayaan yang terintegrasi dengan wisata, pengembangan nilai dan pelestarian budaya lokal  | Mendata dan menetapkan status cagar budaya, menyelenggarakan event budaya dan tradisi   |
| 26         | Meningkatnya kualitas hidup penyandang disabilitas dan lanjut usia             | Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia   | Meningkatkan kompetensi, mewujudkan kabupaten ramah anak, disabilitas dan lansia  |
| 27         | Meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin                                     | Peningkatan perlindungan sosial, pemberdayaan akses permodalan bagi RTS   | Menyediakan program perlindungan sosial, pemberdayaan peningkatan efektivitas kelembagaan TKPK dan modal sosial masyarakat  |

**Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.**

| <b>No.</b> | <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan</b>   |
|------------|--|---|---|
| 1          | Meningkatnya Kesejahteraan Petani  | Peningkatan akses permodalan, sarana dan prasarana pertanian, kompetensi petani           | Meningkatkan kemampuan modal, keterampilan dan sarana prasarana pertanian   |
| 2          | Meningkatnya produksi dan daya saing produksi usaha pertanian dan perikanan            | Peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan         | Meningkatkan keterampilan, efisiensi produksi, produktivitas dan daya saing produk usaha pertanian dan pertanian      |
| 3          | Meningkatnya kemampuan SDM Masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha                    | Peningkatan kompetensi dan keterampilan pelaku ekonomi serta kemitraan antar pelaku usaha | Meningkatkan daya saing pelaku usaha, kewirausahaan dan profesionalisme pelaku ekonomi.                               |
| 4          | Meningkatnya kemitraan, peran dan kontribusi lembaga perekonomian                      | Penguatan jejaring antara pelaku dan lembaga perekonomian                                 | Melakukan fasilitasi kerja sama dan kemitraan antar pelaku perekonomian   |
| 5          | Meningkatnya iklim investasi dan daya saing bisnis daerah                              | Peningkatan daya saing daerah   | Meningkatkan pelayanan perijinan investasi, pengembangan infrastruktur, penyesuaian penataan ruang, penataan regulasi |
| 6          | Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM  | Peningkatan profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM.                                | Menyediakan fasilitasi pelatihan dan pendampingan, kemudahan perijinan dan akses fasilitasi permodalan                |
| 7          | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai dan terjangkau | Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana perdagangan                          | Membangun sarana dan prasarana perdagangan, peningkatan profesionalisme pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang.     |
| 8          | Meningkatnya industri produk pertanian   | Peningkatan peran sektor industri yang mendukung pertanian                                | Menata ruang untuk pengembangan industri, meningkatkan kemampuan, mutu manajemen industri yang mendukung pertanian    |

| <b>No.</b> | <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan</b>   |
|------------|--|---|---|
| 9          | Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat | Peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD                                    | Meningkatkan kemampuan permodalan, mutu manajemen, pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD   |
| 10         | Berkembangnya pusat pertumbuhan perekonomian                                       | Meningkatkan kawasan pusat pertumbuhan perekonomian baru                        | Pengembangan wilayah/kawasan pertumbuhan perekonomian   |
| 11         | Berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan pertanian                 | Pengembangan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan pertanian dan perdesaan | Meningkatkan jumlah tujuan wisata, mengembangkan destinasi wisata yang ada, meningkatkan kompetensi pelaku pariwisata dan mengembangkan desa wisata |
| 12         | Meningkatnya ketahanan pangan berbasis potensi pangan lokal                        | Peningkatan ketersediaan, keragaman dan keamanan pangan                         | Menambah stok, mengembangkan keragaman konsumsi dan menjaga keamanan pangan masyarakat.   |

**Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance*)**

| <b>No.</b> | <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>  | <b>Arah Kebijakan</b>  |
|------------|--|--|--|
| 1          | Tertatanya kelembagaan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien, serta meningkatkan pelayanan publik       | Penataan kelembagaan OPD berdasarkan kewenangan dan kebutuhan daerah   | Menyusun dan menetapkan urusan, kewenangan, SOTK, standar pelayanan  |
| 2          | Tersedianya produk hukum daerah yang memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan | Penataan prosedur dan produk hukum daerah  | Meningkatkan kompetensi penyusun, kualitas proses penyusunan, kualitas, penyebarluasan produk hukum daerah, pendayagunaan TI untuk dalam pembentukan produk hukum daerah |
| 3          | Meningkatnya kinerja dan kepercayaan publik kepada DPRD  | Peningkatan kapasitas, fungsi dan peran DPRD   | Meningkatkan intensitas hubungan DPRD dan konstituen, membuka ruang konsultasi publik dan meningkatkan kompetensi anggota DPRD.  |
| 4          | Terwujudnya keselarasan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya              | Penguatan kerjasama, kemitraan dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya serta pengembangan daerah otonom baru | Mengadakan kerjasama peningkatan wilayah perbatasan, penguatan koordinasi dan konsultasi   |
| 5          | Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan                                   | Peningkatan pengelolaan dan penyelamatan dokumen/arsip daerah  | Mendayagunakan teknologi untuk penyelamatan arsip daerah, meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan.   |
| 6          | Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan yang memadai   | Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan  | Menuntaskan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, merehabilitasi kantor kecamatan dan desa  |
| 7          | Terwujudnya sistem informasi manajemen pemerintahan yang modern dan meningkatnya transparansi publik                   | Pendayagunaan teknologi informasi dan peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan                          | Memanfaatkan sistem informasi, dan membuka informasi dan mempermudah pelayanan penyelenggaraan pemerintahan  |
| 8          | Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil  | Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan  | Menjajaki kebutuhan, mengembangkan kebijakan berbasis penelitian menunjang   |



| <b>No.</b> | <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan</b>  |
|------------|--|---|--|
|            | penelitian dan pemanfaatan IPTEK dalam penyelenggaraan pemerintahan                              | IPTEK sebagai bahan masukan kebijakan   | penyelenggaraan pemerintahan   |
| 9          | Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang baik dan berkeadilan                             | Peningkatan proses partisipasi dan kualitas perencanaan daerah serta publikasi perencanaan daerah                                 | Membuka ruang partisipasi formal, informal dan berbasis TI, menjaga efektivitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah.            |
| 10         | Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel             | Peningkatan tata kelola keuangan dan pemanfaatan aset daerah  | Memperbesar belanja layanan publik strategis, mempertahankan WTP, meningkatkan kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD                    |
| 11         | Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan   | Peningkatan kompetensi, kesejahteraan dan etika aparatur pemerintahan   | Mewujudkan aparatur yang profesional, melayani dan dipercaya publik  |
| 12         | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN  | Pencegahan KKN melalui efektivitas pengawasan internal, penguatan sistem dan kultur aparatur                                      | Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik kepada pemerintah  |
| 13         | Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat                                       | Peningkatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat   | Menegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelibatan LINMAS, peningkatan deteksi dini, menjalin kemitraan dengan APH dan masyarakat |
| 14         | Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis dan meningkatnya partisipasi masyarakat            | Peningkatan pendidikan dan partisipasi politik masyarakat serta wawasan kebangsaan yang selaras dengan nilai keagamaan dan budaya | Menumbuhkan kehidupan politik yang demokratis dan meningkatnya kepercayaan dan partisipasi publik  |
| 15         | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan masyarakat desa yang sejahtera | Perbaikan tata kelola, peningkatan pelayanan desa   | Meningkatkan kompetensi, kesejahteraan dan pelayanan pemerintahan desa terhadap masyarakat   |
| 16         | Tersedianya data informasi pembangunan daerah  | Penyelenggaraan Kabupaten Tasikmalaya Satu Data   | Melakukan integrasi data informasi pembangunan daerah  |

**Misi 4: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.**

| <b>No.</b> | <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan</b>  |
|------------|--|---|--|
| 1          | Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dan layanan dasar                             | Peningkatan jaringan irigasi, sumber daya air, dan perhubungan serta penerangan   | Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur yang memadai dan aman untuk menunjang pertanian, lalu lintas orang dan barang |
| 2          | Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan                                       | Peningkatan ketersediaan PSU Perumahan dan permukiman perkotaan dan perdesaan     | Terpenuhinya standar perumahan dan permukiman yang layak, aman dan nyaman  |
| 3          | Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan  | Perwujudan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang konsisten dan terpadu | Terciptanya ruang yang terpadu dan berkelanjutan dan sesuai kondisi dan kebutuhan pengembangan daerah                    |
| 4          | Terciptanya masyarakat tangguh bencana dan terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, dan terpadu. | Peningkatan pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana                       | Berkurangnya resiko bencana dan meningkatnya daya tahan masyarakat menghadapi bencana                                    |
| 5          | Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan   | Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup                         | Terjaganya kelestarian lingkungan hidup  |